

**DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP
KEMISKINAN DI DESA TELUK KABUPATEN
BATANG HARI PROVINSI JAMBI**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan
pada Fakultas Syariah**



Oleh :

JAUNA

NIM. 105170481

PEMBIMBING :

Agus Fiadi, M.Si

Neni Triana, S.E.,M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1442 H/2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jauna
Nim : 105170481
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas :Syariah
Alamat : Desa Teluk Rt 01 Kecamatan Pelayung

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar Strata (S.1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha SaifuddinJambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 16 April 2021

Yang menyatakan



Jauna

105170481

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Agus Fiadi, M.Si
PembimbingII : Neni Triana, S.E., M.Si
Alamat : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi
Jl. Jambi - Ma.Bulian KM.15 Desa Simpang Sei Duren
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp.(0741)584118-583183

Kepada Jambi, April 2021
Yth
Bapak Dekan Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya maka skripsi saudara Jauna NIM: 105170481 yang berjudul: **“Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan Di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari ”**

telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha SaifuddinJambi.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I



Agus Fiadi, M.Si

NIP. 197008072003121005

Pembimbing II



Neni Triana, S.E., M.Si

NIP.197202022014112004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthra Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthra Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B-3351.../D.II/PP.009/03/2021

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan Di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Jauna
NIM : 105170481
Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Mei 2021
Nilai Munaqasyah : 81,91 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthra Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Dr. Dr. Maryani, M.H.I
NIP. 197609072005012004

Penguji I

Irsadunas Noveri, M.H
NIP. 197111082014121002

Pembimbing I

Agus Triadi, M.Si
NIP. 197008072003121005

Penguji II

Masburiyah, S. Ag., M.Fil.I
NIP. 19720116200032003

Pembimbing II

Neni Triana, S.E., M.Si
NIP. 197202022014112004

Sekretaris Sidang

Dra. Choniyah
NIP. 196605081994032001

Jambi, Mei 2021
Fakultas Syariah
UIN Sulthran Thaha Saifuddin Jambi
DEKAN

Dr. Savuti, S. Ag., M.H
NIP. 19720102 2000031 005

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa Ayat 58)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala pujian dan rasa syukur yang sangat dalam penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada rasul utusan Allah, Nabi akhir zaman dan tidak ada nabi lagi setelah beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini adalah salah satu wujud di antara karunia dan ridho dari Allah yang di limpahkan kepada penulis melalui kemampuan mencurahkan pemikiran kedalam rangkaian karya tulis ini. Selanjutnya untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun judul skripsi ini adalah **“Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kemiskinan Di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari”**.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda tersayang Jaafar dan Ibunda tercinta Aminah atas semua jasa dan pengorbanannya yang tak terukir
2. Bapak Prof Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati sebagai Wakil Rektor I bidang akademik dan pengembangan pendidikan, Bapak Dr. As’ad Isma sebagai Wakil Rektor II bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan dan bapak Dr. Bahrul Ulum, MA sebagai Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan kerjasama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag,MH selaku dekan fakultas syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Agus Salim, S.Th.I.,MA.,M.IR selaku pembantu dekan I,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

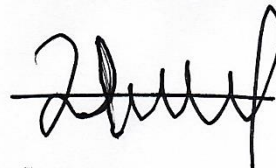
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH selaku pembantu dekan II, Dan Bapak Dr. H.Ishaq, SH.,M.Hum selaku pembantu dekan III, Fakultas syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

6. Ibu Irmawati Sagala, S.IP.M.Si selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan dan bapak Yudi Armansyah, S.Th.I.,M.Hum selaku sekretaris jurusan ilmu pemerintahan fakultas syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Agus Fiadi, M.Si yang juga selaku pemimbing I dan Ibu Neni Triana, S.E.,M.Si selaku pemimbing II Yang telah membimbing dan meluangkan waktu dalam bimbingan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen fakultas syari'ah serta Karyawan fakultas syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Bapak dan ibu seluruh guru dan staf Sekolah Luar Biasa Negeri Muara Bulian Desa yang telah membantu saya serta memberikan masukan yang insyaallah sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini
10. Sahabat-sahabat jurusan ilmu pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi angkatan 2017.

Penulisan mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan pahala atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya kepada Allah SWT segala usaha dan upaya penulis berserah diri. Besar harapan kami semoga skripsi ini ada manfaatnya.

Jambi, 21 April 2021



Jauna
105170481

ABSTRAK

Jauna, NIM: 105170481, “Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan Di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari”.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dimiliki oleh setiap negara. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang memiliki keterbatasan ketrampilan untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa kebijakan pengentasan kemiskinan di putuskan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah ada sejak tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk melihat (1) bagaimana peran pemerintah desa terhadap Program Keluarga harapan (PKH), (2) dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan, (3) faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dengan tujuan menganalisis pelaksanaan PKH yakni di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran pemerintah desa terhadap Program Keluarga Harapan yaitu melakukan pendataan keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan, penyaluran yaitu pemerintah desa bekerja sama dengan agen BRI link untuk memudahkan keluarga miskin melakukan pencairan bantuan tanpa harus ke kantor pos untuk pencairan bantuan, memvalidasi data penerima PKH ketika peserta tersebut sudah beralih status menjadi keluarga sejahtera, merubah pola pikir KSM dengan mengadakan sosialisasi yang diadakan setiap bulannya bersama pendamping PKH tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan serta pembinaan ekonomi dengan pemberian modal usaha kepada keluarga miskin untuk menambah penghasilan KPM. (2) dampak PKH terhadap kemiskinan yaitu menyadarkan masyarakat untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah, sadar pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak untuk masa depan mereka kedepannya. Namun disisi lain timbulnya kecemburuan sosial antara penerima bantuan dengan orang yang tidak mendapatkan bantuan. (3) faktor penghambat yang mempengaruhi PKH terhadap kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari yaitu data tersebut turun langsung dari pusat bersifat *top down* bukan *bottom up* sehingga data tersebut berbeda dengan keadaan dilapangan dan nama peserta yang tidak berhak menerima bantuan tersebut tidak bisa ditukar atau ditambah.

Kata Kunci : Dampak, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan

PERSEMBAHAN

Alahamdulillahirobbil alamin Allahumma Sholli Ala Muhammad dengan rahmat Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan, pertolongan, serta motivasi dalam menuntut ilmu, untuk kedua orang tua tercinta: Ayahanda Jaafar dan Ibunda Aminah, yang telah merawat dan mendidikku dengan penuh kesabaran serta tak henti-hentinya memberikan do'a kepadaku disetiap sujudnya. Berkat do'a dan dorongan motivasi mereka berdualah saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan tak luput kepada adik-adik saya, serta sahabat-sahabatku tercinta yang selalu ada baik dalam suka dan duka, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam jalan hidupku. Kepada kedua Dosen Pembimbingku terimakasih banyak atas bimbinganya dalam meberikan pemikiran-pemikiran, masukan, gambaran dan ide-ide, bahkan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi saya dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.

Dan untuk seseorang yang selalu menyemangati, mendoakan serta memberikan support dan masukkan terhadap segala persoalan yang saya hadapi, terimakasih telah berjuang bersama hingga saat ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitain	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Tinjauan Pustaka	24
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Jenis Dan Sumber Data Penelitian	29
C. Instrumen Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisis Data.....	31
E. Jadwal Penelitian.....	33

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari	34
B. Profil Desa Teluk Kabupaten Batang Hari.....	34
C. Visi dan Misi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari	39
D. Struktur Organisasi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari	40
E. Data Penerima PKH Desa Teluk Kabupaten Batang Hari	41
F. Data Penduduk Miskin.....	42

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Desa terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk	43
B. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kemiskinan di Desa Teluk.....	52
C. Faktor-faktor Penghambat Program Keluarga Harapan (PKJ) terhadap Kemiskinan	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

PKH	: Program Keluarga harapan
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
BDT	: Basis Data Terpadu
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
HIMBARA	: Himpunan Bank Negara

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data Penerima PKH
Tabel 2	: Skema Bantuan Perbulan
Tabel 3	: Jadwal Penelitian
Tabel 4	: Batas Wilayah
Tabel 5	: Jumlah Penduduk
Tabel 6	: Mata Pencarian
Tabel 7	: Jumlah Pendidikan
Tabel 8	: Jumlah Prasarana Kesehatan
Tabel 9	: Data Penerima Program Keluarga Harapan
Tabel 10	: Data Penduduk Miskin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi perbincangan banyak pihak karena kemiskinan merupakan permasalahan multi-sektoral dan menjadi tanggung jawab semua pihak baik dari tingkat kementerian atau lembaga maupun individu masyarakat.¹

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan.² Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dilihat dari rendahnya pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Seseorang yang dikategorikan orang miskin yaitu orang yang jumlah pengeluarannya per bulan di bawah 1.600.000 untuk memenuhi kebutuhan dasar, jika pengeluarannya diatas dari 1.600.000 per bulan maka tidak dikategorikan orang miskin. Berdasarkan dari data BPS Kabupaten Batang hari kemiskinan pada tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar

¹Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pembedayaan Sebagai Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Elex Media Komoutindo,2007) hlm. 15

²Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan,Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: YKPN, 2002) hlm. 112

17,62% sedangkan pada tahun 2018 persentase penduduk miskin 16,79% dan pada tahun 2019 menjadi 17,00% penduduk miskin di Kabupaten Batang Hari.³

Oleh sebab itu, program penanggulangan kemiskinan terus ditingkatkan guna menekan angka kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan intruksi Presiden dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mana terdapat pada pasal 1 ayat 1 “penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.”⁴ Hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan pada pasal 1 ayat 11 “penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat”.⁵

Desa Teluk merupakan Desa yang berada di Kabupaten Batang hari yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.305 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 687 KK. Kondisi penduduk Desa Teluk rata-rata memiliki penghasilan dari petani karet, sawit, berkebun, wirasuwasta, buruh bangunan dan nelayan. Jadi kondisi

³ BPS Kabupaten Batang Hari, *Kemiskinan*, www.bps.go.id diakses pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 09.40

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan



perekonomian di Desa Teluk bisa dikatakan cukup rendah karena penghasilan yang di peroleh penduduk Desa Teluk hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakain dan tempat tinggal. Kondisi ini berdampak pada sedikitnya anak yg mendapatkan pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan perekonomian orang tua. Oleh sebab itu kondisi kemiskinan di Desa Teluk relatif tinggi dengan dilihat dari jumlah penerima bantuan PKH sebanyak 126 KK dan data kemiskinan di Desa Teluk sebanyak 147 KK yang sudah di sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan ini data 2019 sampai hingga sekarang.

Untuk menimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang khususnya kemiskinan maka pemerintah mengeluarkan salah satu program bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini salah satu upaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan warga miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.⁶ Program Keluarga Harapan merupakan Program yang di buat oleh Kementerian Sosial RI yang berlandaskan pada keputusan dari

⁶ Kementerian Sosial RI, *Program Keluarga Harapan* 2016



Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang “Program Keluarga Harapan”.⁷

Program Keluarga Harapan mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial serta mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sekaligus menciptakan perubahan perilaku serta kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.⁸

Program Keluarga Harapan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan di harapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Tahun 2017 tahap uji coba Program Keluarga Harapan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sedangkan di Desa Teluk merupakan salah satu Desa yang melaksanakan Program Keluarga Harapan karena Desa Teluk merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk 1.305 jiwa, 15 Rukun Tetangga dan 4 Dusun. Program Keluarga harapan dilaksanakan pada tahun 2018 dan sudah berjalan selama 3 tahun.

Berikut Data masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan sebagai berikut :

⁷ PKH, *Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, <http://pkh-dasar-hukum> /diakses pada 6 Desember 2020 pukul 10.30

⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang *Program Keluarga Harapan*, pasal 2



Tabel 1
Data Keluarga Miskin Penerima PKH 2018 Desa Teluk

No	Rukun Tetangga (RT)	Jumlah KPM
1	Rt 01	7 Orang
2	Rt 02	12 Orang
3	Rt 03	7 Orang
4	Rt 04	11 Orang
5	Rt 05	12 Orang
6	Rt 06	8 Orang
7	Rt 07	9 Orang
8	Rt 08	9 Orang
9	Rt 09	6 Orang
10	Rt 10	8 Orang
11	Rt 11	5 Orang
12	Rt 12	9 Orang
13	Rt 13	8 Orang
14	Rt 14	7 Orang
15	Rt 15	3 Orang
15	Rt 15	3 Orang
	Jumlah	121 Orang

Sumber : Kantor Desa Teluk Kabupaten Batang Hari⁹

⁹ Dokumentasi di Kantor Desa Teluk Kabupaten Batang Hari



Berdasarkan data di atas program keluarga harapan di Desa Teluk belum efektif karena jumlah penduduk miskin di Desa Teluk 147 KK sedangkan yang mendapatkan bantuan pada tahun 2018 sebanyak 121 KK dan 2019 sebanyak 126 KK oleh karena itu masih banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), karena data tersebut dikeluarkan langsung dari pusat tanpa melihat kondisi dilapangan jadi perlu adanya kerja sama dari pusat yaitu Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten dan Pemerintah Desa sehingga data yang diturunkan sebagai peserta penerima PKH sesuai dengan keadaan dilapangan, selain itu ditemukan juga peserta yang berasal dari pejabat aparat desa yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), hal ini jelas membuktikan masih dijunjungnya budaya nepotisme sehingga bantuan yang di lakukan oleh pemerintah melalui Program Keluarga Harapan belum tepat sasaran. Harapan kedepannya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari dan akan memberikan dampak bagi keluarga miskin penerima manfaat terutama untuk dibidang pendidikan dan kesehat. Melalui Program ini juga menumbuhkan mental keluarga miskin untuk menyekolahkan anak sehingga mengurangi pekerja anak dan pentingnya memeriksakan kesehatan dipelayanan kesehatan.

Berdasarkan fenomena diatas penulis ingin melakukan penelitian mengenai Program Keluarga Harapan, dengan judul “Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah desa terhadap Program Keluarga Harapan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

2. Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan terhadap kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari?
3. Apa faktor-faktor penghambat dan upaya yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan terhadap kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan mengambang khususnya tentang Program Keluarga Harapan (PKH), maka untuk mempermudah penelitian ini penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang peran pemerintah desa terhadap Program Keluarga Harapan (PKH), dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan dan faktor penghambat PKH terhadap kemiskinan di Desa Teluk.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - (a) Untuk mengetahui peran pemerintah desa terhadap PKH di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari
 - (b) Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari adanya PKH di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari
 - (c) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan upaya yang mempengaruhi PKH terhadap kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari?
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan evaluasi, informasi, dan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah untuk mengembangkan program keluarga harapan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaksana Program Keluarga Harapan sekaligus memberikan hasil positif dan negatif bagi penerima manfaat yang nantinya mempengaruhi dampak Program Keluarga Harapan terhadap kemiskinan.

E. Kerangka Teori

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dimiliki oleh setiap negara. Di negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan menjadi masalah yang sangat penting yang perlu dipecahkan. Beberapa kebijakan diterapkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kebijakan ini disebut kebijakan publik.

1. Kebijakan Publik



Kebijakan publik merupakan serentetan intruksi atau perintah dari para pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁰

Beberapa defenisi kebijakan diantaranya :

- (a) Menurut Chandler dan Plano kebijakan publik adalah pemamfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan.
- (b) Menurut Woll kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Adapun pengaruh dari tindakan pemerintah tersebut adalah :

1. adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
2. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil yang membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.¹¹

¹⁰ Eky Riskiana, “Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wono Pringo)”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, (2020), hlm. 47



Berdasarkan defenisi dari kebijakan publik menurut woll yang menjelaskan kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Artinya bahwa Program Keluarga Harapan merupakan salah satu kebijakan publik dari pemerintah yang memiliki tujuan khusus dan jelas yaitu mengurangi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan rakyat. Selain itu, program ini memiliki landasan hukum yang telah disahkan oleh pemerintah dan adanya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung program ini.

Kebijakan juga berfungsi menilai keselarasan antara teori kebijakan dengan praktek implementasi dilapangan yang berupa dampak, apakah Program Keluarga Harapan yang diterapkan sesuai dengan perkiraan. Dari hasil penelitian lapangan ini dapat meilihat secara langsung apakah Program Keluarga Harapan sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan program tersebut yaitu mengurangi kemiskina sehingga memberikan dampak bagi peserta penerima manfaat.

2. Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan adalah kemampuan orang khususnya kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sehingga mereka memiliki kebebasan dalam berpendapat, bebas dari kelaparan, dan bebas dari kebodohan. Dapat

¹¹Abdal, *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*, (Bandung, 2 November 2015), hlm. 30



menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya. Dan ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹²

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harta dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakannya. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal maupun secara kondisi eksternal.

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (PT. Refika Aditama, 2005), hal. 58



PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.¹³

PKH di harapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) agar mampu meningkatkan kualitas diri untuk mencapai kesejahteraan sosial.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah Program Keluarga Harapan diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas.

Tujuan program keluarga harapan¹⁴

- (1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- (2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

¹³ Kementerian Sosial, *Pedoman PKH*, (Jakarta : 2019), hlm.9

¹⁴ Kementerian Sosial, *Pedoman PKH*, (Jakarta : 2019), hlm.25

- (3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- (4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- (5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

c. Sasaran Penerima Bantuan PKH

Berdasarkan Pasal 3, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH dikatakan bahwa, sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanggulangan fakir miskin, yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.¹⁵

d. Besaran bantuan PKH

Bantuan Sosial PKH diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan beban kebutuhan keluarga dalam aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial akan mendapatkan besaran bantuan yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan beban tanggungan dari setiap keluarga penerima manfaat. Artinya nominal besaran jumlah bantuan setiap penerima bantuan tidak akan sama, hal ini dihitung berdasarkan jumlah komponen masing-masing PKH.

Tabel 2

SKEMA BANTUAN PERBULAN TAHUN 2020

No	KATEGORI	INDEKS/TAHUN	INDEKS/BULAN

¹⁵ PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 3



1.	BUMIL	3.000.000	750.000
2.	AUD	3.000.000	750.000
3.	SD	900.000	225.000
4.	SMP	1.500.000	375.000
5.	SMA	2.000.000	500.000
6.	PD	2.400.000	600.000
7.	PPT	3.000.000	750.000
8.	LU	2.400.000	600.000

Sumber : Dokumentasi Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari

- (a) Ibu hamil 3 juta/tahun
- (b) Anak usia dini 3 juta/tahun
- (c) Anak SD 900 ribu/tahun
- (d) Anak SMP 1.5 juta/tahun
- (e) Anak SMA 2 juta/tahun
- (f) Penyandang disabilitas 2,4 juta/tahun
- (g) Penderita penyakit TBC 3 juta/tahun
- (h) Lanjut usia 2,4 juta/tahun.

e. **Komponen Program Keluarga Harapan**

1. Kriteria komponen kesehatan
 - (a) ibu hamil atau menyusui
 - (b) anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6(enam) tahun
2. Kriteria komponen pendidikan
 - (a) Anak SD/MI atau sederajat



- (b) Anak SMP/MTs atau sederajat
- (c) Anak SMA/MA atau sederajat
- (d) Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
- 3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial
 - (a) Lanjut usia dari 60 dan
 - (b) Penyandang disabilitas berat¹⁶

f. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

- (a) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (b) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (c) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas berat. Keluarga penerima

¹⁶ Kementerian Sosial, *Pedoman PKH*, (Jakarta : 2019), hlm.26



manfaat hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.¹⁷

4. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Menurut Suparlan kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.¹⁸ Sedangkan menurut Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dikutip oleh Ali Khomsan dkk, menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh orang miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Berdasarkan pendapat di atas yang mendefenisikan mengenai kemiskinan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi ketidak mampuan seseorang karena rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan maupun papan.

b. Penyebab Kemiskinan

¹⁷ Kementerian Sosial, *Pedoman PKH*, (Jakarta : 2019), hlm.28

¹⁸ Reza Attabiurrobbi Annur, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* , Vol. 2 No. 4, 2013, hlm.412

Berdasarkan pusat penelitian sosial ekonomi menyimpulkan bahwa ada

6 penyebab kemiskinan yaitu :

- (1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota keluarga
- (2) Rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya kualitas dan aset produksi serta modal kerja
- (3) Rendahnya penerapan teknologi
- (4) Rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah
- (5) Kurang tepatnya kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam investasi dalam rangka pengentasan kemiskinan
- (6) Kurangnya peranan kelembagaan yang ada

Selain itu kemiskinan terjadi akibat rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat rendahnya produktivitas dan pendapatan yang diterima, sehingga pendapatan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan.¹⁹

c. Kriteria Penduduk Kemiskinan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) kriteria penduduk miskin yaitu :

¹⁹Johannes, De Britto Priyono, *Analisis Kriteria dan Indikator Kemiskinan Multidimensi*, (Yogyakarta: 2017), hlm. 18

- (1) Luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m perorang
- (2) Lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu dan kayu murahan
- (3) Dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu, rumbai atau kayu yang berkualitas rendah
- (4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama rumah tangga lain menggunakan satu jembatan
- (5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- (6) Air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindung
- (7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar
- (8) Hanya mengonsumsi daging, susu dan ayam satu kali seminggu
- (9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- (10) Hanya mampu makan satu atau dua kali sehari
- (11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik
- (12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani, buruh, nelayan, bangunan, buruh berkebun atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan
- (13) Pendidikan terakhir kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat sekolah (SD) atau hanya SD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

- (14) Tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa di jual dengan nilai minimal 500.000 seperti sepeda motor, emas, hewan ternak ataupun barang modal lainnya.²⁰

d. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Menurut Chambers, kemiskinan dapat dibagi menjadi 4 bentuk yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standard untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standard kesejahteraan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya terjadi berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk

²⁰ Jainuddin, *Sistem Informasi, Kriteria Rakyat Miskin, Waterfall*, Jurnal Ilmia Ilmu Kmputer, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 42



memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen.

4. Kemiskinan Structural

Kemiskinan structural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya, politik yang kurang mendukung kebebasan kemiskinan.²¹

e. Indikator Kemiskinan

Pada umumnya, salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas. Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah :

- (a) Keterbatasan pangan yaitu dapat dilihat dari rendahnya konsumsi kalori penduduk miskin, buruknya status gizi bayi, balita dan ibu
- (b) Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahalny biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.
- (c) Keterbatasan akses pendidikan dapat di ukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahalny biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan dan rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.

²¹ Elvira Handayani Jacobus, *Analisis Faktor-Faktot yang Mempengaruhi Kemiskinan*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 19, No. 7, 2018, hlm.5



- (d) Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi yang dapat dilihat dari kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni sekaligus lingkungan pemukiman yang sehat dan layak
- (e) Keterbatasan akses terhadap air bersih dapat dilihat dari sulitnya mendapatkan air bersih, keterbatasan penguasaan sumber air dan rendahnya mutu sumber air
- (f) Keterbatasan akses terhadap tanah dapat dilihat dari ketidak pastian kepemilikan dan penguasaan tanah, akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani
- (g) Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam dapat dilihat dari buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumber daya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir dan daerah pertambangan
- (h) Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik social maupun ekonomi
- (i) Keterbatasan akses untuk partisipasi dapat diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan
- (j) Besarnya beban kependudukan, dapat dilihat dari besarnya tanggung jawab keluarga dan besarnya tekanan hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Indikator-indikator yang dikemukakan oleh Bappenas mencakup keseluruhan aspek yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemiskinan.²²

f. Program Pengentasan Kemiskinan

Dari penjelasan di atas mengenai program penanggulangan kemiskinan dapat diambil kesimpulan bahwa program penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial. Salah satu program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah yang bekerja sama dengan dinas sosial yaitu PKH. Program Keluarga Harapan adalah program bantuan tunai bersyarat bagi rumah tangga miskin yang menerima manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia (SDM) agar penerima manfaat dapat merubah mindset masyarakat untuk bisa maju dan hidup sejahtera.

g. Dampak-dampak Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan seseorang atau sekelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar dan oleh sebab berikut ini dampak yang terjadi akibat kemiskinan.²³

- (a) Banyaknya pengangguran.
- (b) Terciptanya perilaku kekerasan, terjadi akibat seseorang tidak lagi mampu mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal sekaligus mereka

²² Ardito Binadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta Deepublish, 2017), cet. Ke 1, hlm.17

²³ Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm.20



- (c) merasa tidak sanggup bertahan dan menjaga kelangsungan hidupnya maka jalan pintaspun dilakukan.
- (d) Banyaknya anak yang tidak mengenyam pendidikan karena biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu untuk menjangkau dunia sekolah.
- (e) Susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan akibat dari biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin memutuskan untuk tidak berobat, sehingga mereka tidak sama sekali mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

F. Dampak Program Keluarga Harapan

Dampak Program Keluarga Harapan di Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dapat dilihat pada tahun 2017 kemiskinan mencapai 10,96% turun menjadi 10,64% kemiskinan di Indonesia, keberhasilan Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan dapat dilihat dari aksesibilitas penerima manfaat dalam pendidikan peningkatan kehadiran siswa sekolah dasar setelah menerima PKH sebesar 49,2%, sekolah menengah pertama 49,9%, sekolah menengah atas 30,9% dan berdampak pada penurunan pekerja anak.

Dampak pada konsumsi rumah tangga setelah menerima PKH tercatat meningkat lebih 10% seperti belanja pangan untuk protein mengalami kenaikan 6,8%, ibu hamil yang memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan sebesar 45%, pemeriksaan kesehatan balita 47%, jumlah kelahiran 4,3%, kelahiran di bantu tenaga medis 6,1%, imunisasi lengkap 4,5% dan angka kelahiran kerdil atau stunting turun menjadi 2,7%. Jadi dampak Program Keluarga Harapan di



Indonesia pada tahun 2017 membawa perubahan yang signifikan bagi keluarga penerima manfaat.²⁴

G. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi ini, penulis menghimpun beberapa referensi yang relevan dengan judul skripsi, dengan tujuan untuk memperkaya wawasan pengetahuan maupun terkait sebagai berikut :

Munawwarah Shahib Tahun 2016 Universitas Islam Negri Alauddin Makassar. Munawwarah Shahib melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa dan melihat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dari segi prinsip-prinsip ekonomi islam serta untuk mengetahui apakah Program Keluarga Harapan berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa . Metode yang digunakan adalah kombinasi (*mix methods*) guna mengungkap fakta yang berkaitan Program Keluarga Harapan dan pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berjalan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata yang didapatkan dari item pertanyaan sebesar

²⁴ Dikutip dari <https://m.ccniindonesia.com/ekonomi/program> keluarga harapan di klaim efektif tekan kemiskinan diakses pada 22 juli 2020



224 atau sebesar 82,6% yang menandakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pelaksanaannya menempati kategori sangat tinggi atau sangat baik dengan melihat kenyataan dilapangan ditemukan bahwa Program keluarga Harapan sesuai dengan prinsip tauhid, keseimbangan, khilafah, dan prinsip keadilan yang terdapat pada prinsip ekonomi islam. (2) pengaruh kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa PKH membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan yakni sebesar 38,4% sedangkan 61,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain²⁵. Perbedaan dengan Skripsi penelitian yang saya lakukan adalah dari metode yang digunakan dalam penelitian karena saya menggunakan metode kualitatif dengan berlandaskan pada apa yang disampaikan responden dan data yang dikumpulkan kata-kata dan gambar sedangkan penelitian Munawwarah Sahib menggunakan metode kuantitatif dan menganalisis pelaksanaan program keluarga harapan sesuai tujuannya dan pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan.

Rahmania Tahun 2020 Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Rahmania Melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”**. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan, faktor pendukung dan faktor penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat di Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo

²⁵Munawwarah, Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, (Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016)



Provinsi Jambi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris (penelitian lapangan). Hasil penelitian adalah (1) Pelaksanaan PKH di Desa Teluk Rendah Ilir telah dilaksanakan namun belum maksimal yang ditandai dengan adanya 56 warga Desa Teluk Rendah Ilir yang menerima manfaat dari program tersebut, sedangkan data kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir terdapat 97 K, dan dari data penerima manfaat PKH tersebut ada sekitar 15 orang yang tidak terdapat sebagai penduduk miskin. (2) faktor pendukung adalah masih mudahnya mengumpulkan masyarakat saat pertemuan awal dan pertemuan kelompok, semangat dan antusias masyarakat penerima PKH sangat tinggi saat dilakukan pencairan dana PKH, semangat para pendamping yang masih bertahan untuk tetap mendampingi meskipun tidak terlalu intens dan adanya komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk mensukseskan PKH guna memutus rantai kemiskinan ditingkat masyarakat miskin. (3) upaya yang ingin dilakukan aparat Desa Teluk Rendah Ilir adalah ingin bekerja sama dengan pemerintahan yang terkait dalam menentukan data peserta penerima manfaat PKH kedepannya, agar lebih efisien dan sesuai yang diharapkan.²⁶ Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah saya meneliti tentang dampak program keluarga harapan terhadap keluarga miskin yang menerima bantuan setelah sebelumnya tidak mendapatkan bantuan dengan sesudah mendapatkan bantuan adakah perbedaan sedangkan penelitian Rahmania membahas tentang implementasi program keluarga harapan dan metode yang digunakan sama-sama metode kualitatif tapi tempat penelitiannya berbeda.

²⁶ Rahmania, *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*, (Skripsi Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi 2020)



Eky Risqiana 2020 Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pascasarjana Universitas Negeri Semarang . Eky Risqiana melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringo)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk bantuan PKH, peran pendamping PKH serta dampak PKH terhadap keluarga miskin di Kecamatan Wonopringo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk-bentuk bantuan PKH yaitu bantuan uang tunai PKH dan jaminan sosial kesehatan, jaminan pendidikan, bantuan pangan nontunai, beras sejahtera dan bantuan-bantuan lainnya baik yang dibiayai dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. (2) peran pendamping PKH yaitu mendampingi peserta PKH dalam berbagai komitmen PKH seperti verifikasi pendidikan dan kesehatan. Validasi calon peserta PKH, pemuktahiran data serta kegiatan pertemuan keluarga. (3) dampak Pkh terhadap keluarga miskin di Kecamatan Wonopringo yaitu di satu sisi bisa menyadarkan masyarakat untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada pemerintah, sadar pendidikan dan kesehatan serta peduli terhadap lingkungan. Namun disisi lain masih ada masyarakat yang bermental miskin dan merasa perlu dibantu oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya padahal kondisi secara fisik dianggap mampu oleh lingkungan sekitarnya.²⁷ Persamaan Skripsi penulis dengan Skripsi Eky Risqiana yaitu sama-sama membahas tentang dampak program keluarga harapan terhadap

²⁷ Eky Risqiana, *Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringo)*, (Skripsi Mahasiswa Program pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pascasarjana Universitas Negeri Semarang 2020)



kemiskinan, sedangkan perbedaannya yaitu, skripsi penulis membahas tentang peran pemerintah desa terhadap program keluarga harapan, faktor penghambat dan upaya yang mempengaruhi program keluarga harapan sedangkan Skripsi Eky Risqiana tentang bentuk-bentuk bantuan pengentasan kemiskinan dalam program keluarga harapan dan peran pendamping program keluarga harapan terhadap pengentasan kemiskinan.

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian yang pemahaman yang mendasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²⁸ Selain itu penelitian juga merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan suatu kebenaran. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada pengungkapan apa yang disampaikan oleh responden dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, dokumen pribadi, gambar serta catatan dilapangan.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis program keluarga harapan mampu atau tidak memecahkan masalah kemiskinan. Hal tersebut sama halnya dengan teori kebijakan publik bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan bertujuan untuk memecahkan permasalahan umum yang menyangkut masyarakat. Penelitian ini tidak langsung menganalisis program

²⁸ Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11



keluarga harapan di Indonesia, tetapi di wilayah terkecil yaitu Desa Teluk Kabupaten Batang Hari.²⁹

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.³⁰ Dalam penelitian ini data secara langsung diperoleh dari data lokasi peneliti atau objek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.³¹

3. Instrumen Pengumpulan Data

a. Observasi

²⁹ Eky Risqiana, *Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringo)*, (Skripsi Mahasiswa Program pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pascasarjana Universitas Negeri Semarang 2020)

³⁰ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 104

³¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.



Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.³² Wawancara berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan dilakukan secara lisan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi atau kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan dianalisis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang..³³

4. Teknis Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif, Sugiono menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari proses wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit memilih mana yang penting dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah

³² Ibid., hlm. 105

³³ Sugiyono, *metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, hlm. 230



dipahami oleh orang lain.³⁴ Didalam analisis data penelitian menggunakan beberapa teknik analisis yaitu :

a. Reduksi data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian diperoleh terkumpul, proses data reduction terus dilakun lalu dicatat dan data tersebut dipilih-pilih mana data yang sesuai digunakan dalam penelitian.³⁵

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan atau display data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnyadengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja sesuai dengan apa yang telah dipahami.³⁶

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Hasil wawancara peneliti dengan Informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif di kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan dengan bukti-bukti yng kuat, karena masalah dan rumusan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 244

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 247

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 249



masalah dalam penelitian kualitatif akan berkembang setelah penulis berada dilapangan.³⁷

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian.....*, hlm. 252

B. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan, maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terdiri dari tabel jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 4 Jadwal Penelitian³⁸

NO	Nama Kegiatan	Tahun 2020																Tahun 2021												
		Februari			Agustus			September				November				Desemer				Januari			Mei			Juni				
		1	2			2	3	1	2	3	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3
1	Pengajuan Judul	x																												
2	Pembuatan Proposal																													
3	Perbaikan Proposal dan seminar													x																
4	Surat Izin Riset															x														
5	Pengumpulan Data			x													x													
6	Pengelolaan dan Analisis Data				x				x												x									
7	Pembuatan Laporan									x												x								
8	Bimbingan dan Perbaikan																							x						
9	Agenda dan Ujian Skripsi																									x				
10	Perbaikan dan Penjilidan																										x			

³⁸ Diolah Oleh Penulis

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Teluk Kabupaten Batang Hari

Desa Teluk merupakan salah satu Desa yang terletak di bagian Timur di Kabupaten Batang Hari dengan luas wilayah 50 KM² dan berada posisi diatas 1⁰15'1 Lintang Selatan sampai dengan 2⁰20' Lintang Selatan dan diantara 102⁰30' Bujur Timur sampai dengan 104⁰0' Bujur Timur. Dengan batas wilayah Selatan Utara berbatasan dengan Desa Rantau Majo, sebelah Selatan berbatas dengan Desa Olak Rambahan, sebelah Barat berbatasan dengan sungai Batanghari atau Pulau Raman dan sebelah Timur berbatasan dengan Tantan. Desa Teluk terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah penduduk dan rumah tangga.³⁹

Luas wilayah Desa Teluk adalah 8. 838 Ha dimana letak Desa Teluk juga di sesuaikan dengan letaknya dilekungan Sungai Batanghari yang sebelah hulunya terdapat tanjung yang panjang maka lekukan Sungai Batanghari ini di sebut Teluk oleh karena itu Desa Ini diberi nama Desa Teluk. Sedangkan Desa Teluk merupakan Desa yang terletak di Kabupaten Batang Hari dengan memiliki jumlah penduduk yang relatif tinggi.

B. Profil Desa Teluk

Secara Admisistrasi Desa Teluk terletak dibagian Timur Kabupaten Batang Hari dengan luas wilayah 50 KM² dan berada posisi diatas 1⁰15'1 Lintang

³⁹ Dokumentasi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari 25 Januari 2021

Selatan sampai dengan $2^{\circ}20'$ Lintang Selatan dan diantara $102^{\circ}30'$ Bujur Timur sampai dengan $104^{\circ}0'$ Bujur Timur. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 5

Batas Wilayah Desa Teluk⁴⁰

1.	belah Utara	sa Rantau Majo
2.	belah Selatan	sa Olak Rambahan
3.	belah Selatan	sa Pulau Raman
4.	belah Timur	sa Tantan

Sumber : Dokumentasi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari⁴¹

1. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Desa Teluk adalah 2.706 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 687, berikut Tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Teluk :

Tabel 6

Jumlah penduduk tahun 2020⁴²

Kelompok umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
5 Tahun	2	8	10
6 Tahun	8	9	17
25 Tahun	8	1	9
42 Tahun	3	4	7

⁴⁰ Dokumentasi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari

⁴¹ Dokumentasi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari

⁴² Dokumentasi Desa Teluk kabupaten Batang Hari pada 14 Januari 2021

-60 Tahun	7	3	0
-73 Tahun			9
4 Tahun			
mlah	01	05	06

Sumber : Dokumentasi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari⁴³

2. Aspek Ekonomi

a. Bidang Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Teluk secara umum mengalami peningkatan, dapat dilihat dari sebagian besar penduduk bermata pencarian Petani, PNS, Wiraswasta, IRT dan Lainnya.

Tabel 7

Mata Pencarian penduduk Desa Teluk⁴⁴

No	Mata Pencarian	Masyarakat
1.	petani	10 Orang
2.	PNS	10 Orang
3.	wiraswasta	10 Orang
4.	pekerja	13 Orang
5.	perumahan Bangunan	18 Orang
6.	IRT	15 Orang

⁴³ Dokumentasi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari 2021

⁴⁴ Dokumentasi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan suatu Negara karena pendidikan dapat dijadikan sebagai pendukung kemajuan suatu bangsa. Selain itu pendidikan adalah bagian integral bagi suatu Negara, tanpa sektor pendidikan maka dengan sendirinya pemerintah tidak akan berjalan dengan baik dan akan menimbulkan berbagai hambatan disemua sendi masyarakat. Berdasarkan kerangka berpikir demikian, maka sumber daya manusia perlu ditingkatkan oleh pemerintah dalam sektor pendidikan. Pendidikan salah satu paktor pendukung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mensejahterakan rakyat.

Tabel 8

Pendidikan di Desa Teluk⁴⁵

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	2
2.	SD/MI	2
3.	SMP/MTS	2
4.	SMA/SMK/MA	1
5.	Perguruan Tinggi	0
Jumlah		7

⁴⁵ Data Dokumentasi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari Tahun 2021



c. Bidang Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu bentuk kesejahteraan masyarakat. Kesehatan berpengaruh pada aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi kesehatan Desa Teluk cukup baik, dapat dilihat dari status kesehatan. Indikator kesehatan masyarakat dapat dilihat dari angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup dan kurangnya gizi buruk pada bayi.

Tabel 9

Prasarana Kesehatan Desa Teluk

Prasarana Kesehatan	Jumlah
Puskesmas Pembantu	1
Rumah Bersalin	1
Tempat Praktek Bidan	1
Posyandu	1

Sumber : Dokumentasi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari⁴⁶

3. Aspek Pemerintahan

Pemerintahan merupakan salah satu faktor berjalannya dengan baik atau berhasilnya suatu pemerintahan dan kepemimpinan sebagaimana yang diharapkan. Selain merupakan suatu peraturan pemerintahan bahwa suatu organisasi harus ada suatu susunan pengurus secara sistematis, hal ini juga menggambarkan aktivitas kerja objektif.

⁴⁶ Dokumentasi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari 2021



Pelaksanaan pemerintahan Desa Teluk memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa. dalam menjalankan roda pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh beberapa perangkat Desa dan organisasi lainnya seperti Kepala Urusan, Kepala Dusun, Ketua Rt, BPD, Ketua Lembaga Adat dan Ketua Pemuda.⁴⁷

C. Visi dan Misi Desa Teluk Kabupaten Batang Hari

1. Visi

Mewujudkan Desa Teluk yang Maju, Unggul, Berkualitas, Berlandaskan Ketaqwaan (MUDA BERKAWAN)

2. Misi

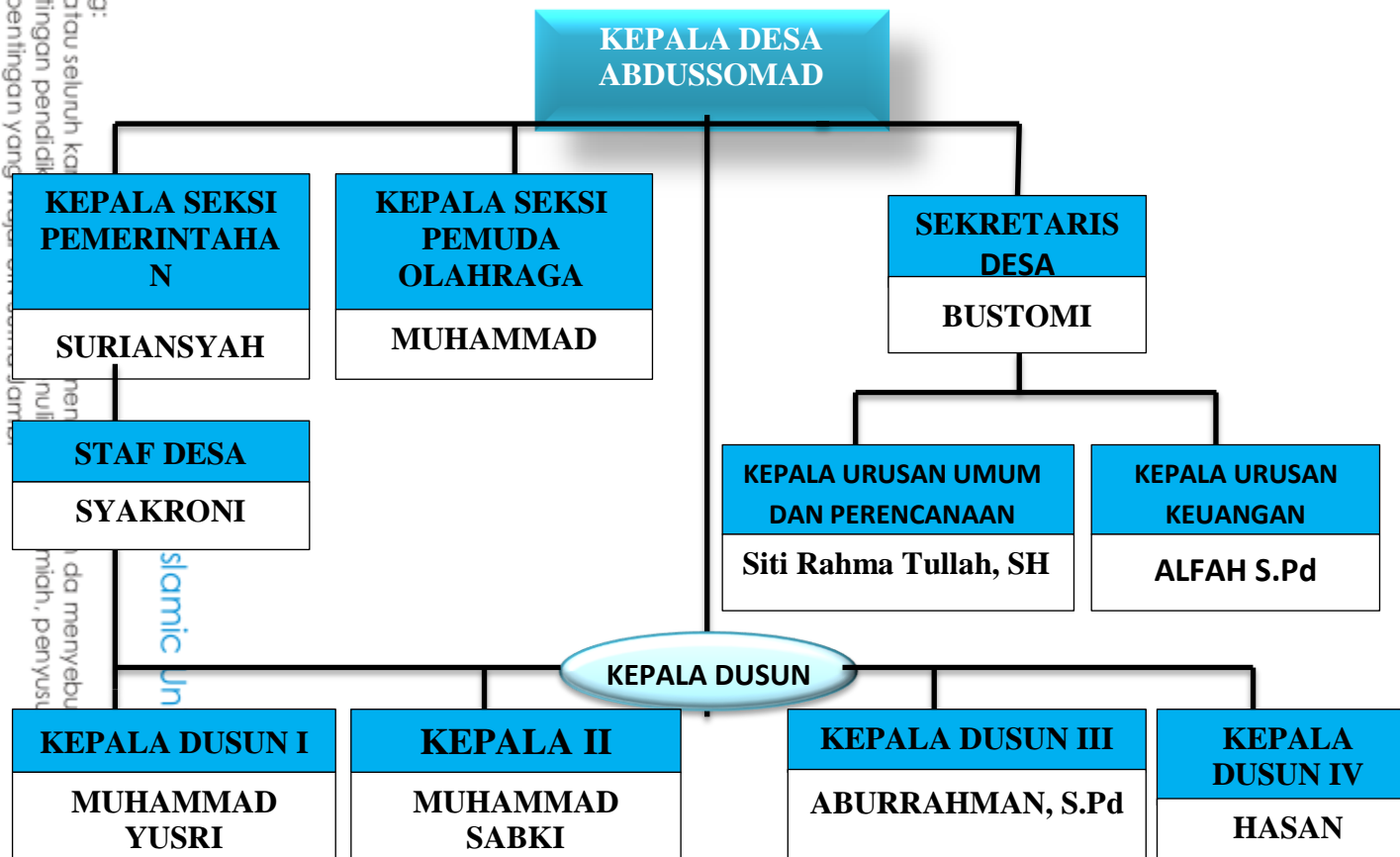
- (a) Membangun SDM yang berdaya saing
- (b) Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang profesional dan proporsional
- (c) Membangun perekonomian yang berkeadilan menuju kesejahteraan semua lapisan masyarakat
- (d) Meningkatkan kualitas Infrastruktur dasar
- (e) Menciptakan lingkungan yang nyaman, aman dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip dukungan SDM dan SDA.

⁴⁷ Data Dokumen Desa Teluk Kabupaten Batang Hari Tahun 2021



D. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



E. Data Penerima PKH Desa Teluk

Tabel 9

Data penerima Program Keluarga Harapan Desa Teluk

No	Rukun Tetangga (RT)	Jumlah KPM
1	RT 01	7 Orang
2	RT 02	13 Orang
3	RT 03	7 Orang
4	RT 04	11 Orang
5	RT 05	11 Orang
6	RT 06	9 Orang
7	RT 07	10 Orang
8	RT 08	10 Orang
9	RT 09	6 Orang
10	RT 10	8 Orang
11	RT 11	5 Orang
12	RT 12	9 Orang
13	RT 13	8 Orang
14	RT 14	8 Orang
15	RT 15	4 Orang
Jumlah		126 Orang

Sumber : Dokumentasi Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari⁴⁸

⁴⁸ Dokumentasi Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari Januari 2021

F. Data Penduduk Miskin di Desa Teluk

Data Penduduk Miskin di Desa Teluk

No	Rukun Tetangga (RT)	Jumlah KPM
1	RT 01	11 Orang
2	RT 02	10 Orang
3	RT 03	15 Orang
4	RT 04	6 Orang
5	RT 05	15 Orang
6	RT 06	9 Orang
7	RT 07	10 Orang
8	RT 08	10 Orang
9	RT 09	11 Orang
10	RT 10	8 Orang
11	RT 11	11 Orang
12	RT 12	7 Orang
13	RT 13	14 Orang
14	RT 14	3 Orang
15	RT 15	6 Orang
Jumlah		147 Orang

Sumber : Dokumentasi Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari⁴⁹



⁴⁹ Dokumentasi Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari 2021

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Desa terhadap Program PKH di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari

Kemiskinan merupakan sebagai suatu standard tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan pasal 1 ayat 1 “penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”. Bentuk penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah pusat salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan.

Sedangkan Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.⁵⁰ Sedangkan Pemerintahan Desa adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tertuang pada pasal 1 ayat 2 dan 3 yang berbunyi Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵¹ Sedangkan fungsi Pemerintah baik dari pusat, daerah maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan.

Oleh sebab itu pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang memegang peran penting dalam menghadapi masalah yang berkembang dimasyarakat yang salah satunya tentang kemiskinan, karena pemerintah desa dituntut semaksimal mungkin dalam menjalankan kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah pusat tentang penanggulangan kemiskinan. desa yang memiliki tingkat kemiskina. Selain itu pemerintah desa juga harus berperan aktif agar suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat merespon masalah atau kebutuhan kongkret yang berkembang dimasyarakat.

⁵⁰ Kustini, *Optic*, Hlm.7

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



Kali ini yang menjadi titik fokus adalah peran pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam Program Keluarga Harapan (PKH) seperti yang disebut dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan PKH diperlukan peran pemerintah desa yang merupakan organisasi pemerintah yang terdekat dengan masyarakat untuk mewujudkan suatu tujuan dari program tersebut untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan mendukung sumber daya manusia yang baik dan melatih mental masyarakat agar mampu untuk hidup sejahtera.⁵²

Peran Pemerintah Desa dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut :

1. Peran pemerintah desa dalam proses pendataan Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) proses pendataan yaitu verifikasi dan pemuktahiran data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam program ini, karena dengan melakukan verifikasi dan pemuktahiran data maka akan di ketahui apakah setiap KSM berhak mendapatkan bantuan atau tidak. Serta mengetahui apakah anggota keluarga KSM memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh bantuan.

⁵² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang *Program Keluarga Harapan*, pasal 2



Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan verifikasi dan pemuktahiran data dilakukan langsung oleh Dinas Sosial melalui pendamping PKH kecamatan yang bekerja sama dengan pemerintah desa dan pendamping PKH desa dalam menentukan calon peserta penerima bantuan sesuai dengan hasil wawancara saya dengan pendamping PKH Kecamatan.

“Beliau mengatakan dari awal proses pendataan calon penerima bantuan tidak terlepas dari kerja sama dengan pemerintah desa dan pendamping untuk menghasilkan data yang valid antara desa dan pendamping yang kemudian di ajukan ke kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan bantuan PKH”.⁵³

Agar dapat informasi yang jelas tentang proses pendataan calon peserta PKH, maka penulis mengadakan wawancara kepada Bapak Somad selaku Kepala Desa.

“Bapak Somad mengatakan memang benar proses pendataan masyarakat penerima PKH didata langsung dari Dinas Sosial melalui pendamping PKH Kecamatan dan data tersebut diserahkan kepada pemerintah desa lalu dilakukan musdes untuk melakukan verifikasi data bagi siapa yang berhak mendapatkan bantuan dan benar dikategorikan orang miskin sehingga data dari pendamping PKH kecamatan dan desa sama”.⁵⁴

Agar mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang proses pendataan peserta PKH dengan data penerima bantuan PKH dan data penduduk miskin tidak sama jumlahnya maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yusuf SE selaku Koordinator Kabupaten mengenai ketidak sinkronan data penerima PKH dengan data penduduk miskin yang diajukan dari Pemerintah Desa melalui pendamping PKH Kecamatan :

⁵³ Wawancara dengan Bapak Hakimin Selaku Pendamping PKH Kecamatan Pelayung, 21 Januari 2021

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Somad selaku Kepala Desa di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari, 28 Januari 2021



“Beliau mengatakan data yang diterima oleh Kabupaten merupakan data dari pemerintah desa kepada pendamping PKH dan data tersebut diserahkan dari pendamping ke Dinas Sosial kemudian data dari Kabupaten dikirimkan ke pusat untuk masuk ke DTKS lalu hasil penetapan dari DTKS oleh Kementerian Sosial baru data tersebut dikirim ke Kabupaten untuk digunakan sebagai Basis Data peserta Program keluarga Harapan. Jadi karena penetapan peserta PKH ditetapkan langsung dari pusat tanpa melihat kondisi lapangan inilah yang menyebabkan terjadinya ketidak sesuaian data penerima PKH dengan data penduduk miskin”.⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa dan pendamping PKH kecamatan saling bekerja sama dalam proses pendataan sehingga data tersebut benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan agar pelaksanaan program PKH nantinya tepat sasaran.

2. Peran pemerintah desa dalam proses penyaluran bantuan PKH

Penyaluran bantuan atau pembayaran dilakukan 4 tahap dalam 1 tahun atau setiap tiga bulan sekali. Dilihat dari hasil penelitian bahwa proses pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin (keluarga penerima manfaat) melalui rekening elektronik (kartu kks) yang digunakan untuk pengambilan bantuan yang berupa sembako dan uang tunai di kantor pos pijoan dahulunya. Namun setelah Dinas Sosial merumuskan peraturan baru, peraturan tersebut memudahkan masyarakat dalam memperoleh bantuan tanpa harus ke kantor pos melainkan melalui agen bri link. Oleh karena itu pemerintah desa bekerja sama dengan agen bri link dalam proses penyaluran dana bantuan, dan pendamping PKH kecamatan selalu mengawasi proses penyaluran di agen bri

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Yusup SE Koordinator Kabupaten Batang Hari, 6 April 2021

link untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam proses penyaluran. Sesuai dengan hasil wawancara peneli dengan bapak Somad selaku kepala desa teluk :

“Beliau mengatakan sebelum adanya peraturan baru dari Dinas Sosial tentang proses penyaluran bantuan, keluarga sangat miskin melakukan pencairan melalui kantor pos yang berada di desa pijoan, tetapi dengan adanya peraturan baru tentang penyaluran yang bisa dilakukan melalui agen bri link maka aparat desa melakukan kerja sama dengan agen bri link yang ada di desa agar memudahkan masyarakat dalam pengambilan bantuan setiap bulannya dengan membawa kartu elektronik (kks) ke agen bri link makan keluarga penerima manfaat bisa melakukan pencairan tanpa harus jauh-jauh kekantor pos”.⁵⁶

Berdasarkan dengan hasil wawancara diatas maka jelas peran pemerintah desa terhadap pelaksanaan PKH cukup baik untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pencairan dana bantuan.

3. Peran pemerintah desa dalam mengubah data penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemerintah Desa bersama pendamping PKH dari desa berhak melakukan perubahan data penerima PKH kepada Dinas Sosial setelah pemerintah desa turun secara langsung kelapangan dan melihat bahwa orang penerima bantuan PKH tersebut secara ekonomi sudah meningkat atau tidak dalam kategori keluarga miskin. Selanjutnya pihak desa bisa mengusulkan ke pendamping PKH kecamatan yang kemudian data tersebut diserahkan ke Dinas Sosial untuk mengalihkan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut kepada warga lain yang berhak menerima bantuan PKH tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara saya bersama Bapak Somad selaku Kepala Desa di Desa Teluk.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Somad selaku Kepala Desa di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari, 28 Januari 2021



“Bapak Somad mengatakan, satu tahun setelah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah desa dan pendamping PKH desa meninjau secara langsung wilayahnya untuk mengetahui apakah peserta PKH telah mengalami perubahan perilaku dan pertumbuhan ekonomi setelah mendapat bantuan PKH”.⁵⁷

Pendamping PKH Desa turut aktif seperti kutipan wawancara diatas didalam pelaksanaan PKH di desa guna mencapai tujuan PKH untuk mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat miskin. Agar mendapatkan informasi yang jelas maka penulis mengadakan wawancara terhadap pendamping PKH Desa Bapak Heri, beliau mengatakan :

“Benar pada saat peninjauan langsung kelapangan untuk melihat dampak dari pelaksanaan PKH kepada masyarakat apakah membawa perubahan positif sehingga beralih status menjadi keluarga sejahtera, pemerintah desa selalu bekerja sama dengan pendamping desa”.⁵⁸

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan kepala desa dan pendamping desa diatas maka, dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa cukup baik untuk terealisasinya PKH di desa agar program tersebut tepat sasaran.

4. Peran pemerintah desa dalam merubah pola pikir KSM

Pemerintah Desa berperan penting untuk merubah pola pikir keluarga miskin akan pentingnya pendidikan dan kesehatan karena rata-rata KSM peserta PKH berpendidikan rendah dan banyak diantara mereka yang tidak tamat sekolah dasar. Jika mereka tidak diberi kesadaran akan pentingnya pendidikan, maka mereka nantinya tidak akan peduli akan pendidikan anak-anak mereka. Namun dengan adanya bantuan PKH yang memberi fasilitas kartu Program Indonesia

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Somad selaku Kepala Desa di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari, 28 Januari 2021

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Heri, Pendamping PKH Desa Teluk Kabupaten Batang Hari, Tanggal 28 Januari 2021

Pintar (PIP) dan BPJS memberi kemudahan bagi peserta PKH untuk memberikan pendidikan dan kesehatan bagi anak mereka.

Pemerintah Desa bersama pendamping kecamatan juga memberikan sosialisasi tiap bulannya kepada peserta PKH untuk menyadarkan mereka tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak mereka hingga akhirnya menyadarkan KSM untuk menyekolahkan anaknya dan rutin memeriksakan kesehatan mereka dan anaknya ke puskesmas dan posyandu. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Somad Kepala Desa Teluk :

“Beliau mengatakan pemerintah desa bersama pendamping PKH dari kecamatan terus memberikan sosialisasi kepada peserta PKH tiap bulannya bahwa pentingnya pendidikan dan kesehatan sekaligus memberi fasilitas, serta bagaimana penggunaan dana bantuan dengan baik untuk kebutuhan mereka”.⁵⁹

Agar mendapat informasi yang jelas tentang pendapat yang disampaikan pemerintah desa, maka penulis mengadakan wawancara terhadap masyarakat setempat tentang keberan sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dengan pendamping, salah satu warga yang penulis wawancarai bersama Ibu Asmalina :

“Sebelum adanya bantuan PKH dan pembinaan yang dilakukan pemerintah desa dan pendamping PKH akan pentingnya pendidikan dan kesehatan saya lebih menyuruh anak saya bekerja di kebun membantu saya karena keterbatasan ekonomi, namun setelah adanya pembinaan saya menyadari pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk masa depannya”.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Somad Kepala Desa Teluk Kabupaten Batang Hari, tanggal 28 Januari 2021

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Asmalina Peserta PKH di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari, tanggal 17 Maret 2021



Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui partisipasi masyarakat saat menjalankan program sangat baik, sehingga peserta penerima manfaat memiliki kesadaran dan kemajuan kearah yang lebih positif, dan berdasarkan dari observasi dengan masyarakat maka dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa ini menunjukkan kesadaran bagi peserta penerima manfaat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan.

5. Peran pemerintah desa dalam pembinaan ekonomi

Pembinaan ekonomi bagi peserta penerima manfaat memiliki makna untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang mencerminkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin. adapun bantuan yang diberikan untuk menunjang perekonomian keluarga miskin yaitu bantuan kebutuhan pokok dan pembinaan kewirausahaan untuk belajar membuka usaha sendiri dengan pemberian modal kepada keluarga miskin dengan harapan keluarga miskin mampu untuk mensejahterahkan kehidupannya kedepan. Sesuai dengan hasil wawancara sya dengan Bapak Somad Kepala Desa Teluk.⁶¹

“Beliau mengatakan selain bantuan berupa uang tunai saya juga mengusulkan untuk pemberian modal usaha kepada pendamping PKH Kecamatan untuk disampaikan ke Dinas Sosial untuk keluarga sangat miskin membuka usaha untuk menunjang perekonomian keluarga miskin untuk bisa meningkatkan perekonomiannya kedepan dengan harapan adanya perubahan ekonomi dari keluarga miskin menjadi keluarga sejahtera”.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Somad Kepala Desa Teluk Kabupaten Batang Hari, tanggal 28 Januari 2021



Untuk mendapatkan informasi yang jelas yang disampaikan oleh pemerintah desa maka peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Asna peserta PKH mengatakan bahwa :

“Setelah mendapatkan bantuan PKH saya juga mendapatkan modal usaha yang diberikan untuk membuka usaha dan uang tersebut saya gunakan dengan membuka usaha jual tabung gas LPG 3 KG untuk menambah penghasilan guna menopang kebutuhan ekonomi saya agar kedepannya saya mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa tergantung pada bantuan”⁶².

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam memajukan taraf perekonomian keluarga miskin cukup baik agar nanti kedepannya mereka bisa hidup sejahtera.

B. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu keluarga miskin dalam mendapatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga peserta PKH dengan harapan program ini akan dapat mengurangi kemiskinan. Seperti yang diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bagi anggota rumah tangga sangat miskin itu sendiri diwajibkan melaksanakan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.⁶³

⁶² Wawancara dengan Ibuk Asna Peserta PKH Desa Teluk Kabupaten Batang Hari, tanggal 17 Maret 2021

⁶³ Diyah Tri Rezki Setyawardani, *Dampak Bantuan PKH terhadap Masyarakat Miskin*, Jurnal Holistik, Vol.13 No. 2, 2020. hlm.11

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terlihat jelas bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Artinya keberadaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilakukan pemerintah dengan baik dapat mengurangi kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari. Hal ini didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa banyak narasumber setuju bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu mengurangi kemiskinan.⁶⁴

Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjalan sangat baik, tidak terlepas dari semangat para koordinator dalam melaksanakan tugas dan kepedulian sosial bagi keluarga miskin. penelitian Fitriia Puspita juga menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu Program penanggulangan kemiskinan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin dan peran moderator dalam program sangat penting dalam pelaksanaan program dilapangan, dan keberhasilan program karena adanya kontak langsung antara moderator dengan masyarakat.⁶⁵

Sedangkan kemiskinan merupakan kondisi ketidak mampuan baik secara individu, kelompok maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya masalah sosial yang lain. Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan pasal 1 ayat 1 “penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program

⁶⁴ Dikutip dalam Munawwarah Sahib, *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa*, hlm.99

⁶⁵ Dikutip dalam Fitri Puspitasari, *Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul*, hlm..1



pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Bentuk penanggulangan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah pusat salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah jika dilaksanakan dengan baik pasti akan membuat hasil yang positif, terlepas dari dampaknya. Seperti tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi kemiskinan dengan jalan memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga miskin serta merubah pola pikir keluarga miskin tentang pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. Mengingat rata-rata tingkat orang tua dalam keluarga miskin bahkan belum mencapai tingkat pendidikan minimal, seperti yang terjadi di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari, hal ini sungguh tidak mudah, sehingga mereka lebih memilih membiarkan anaknya membantu orang tuanya dilapangan dari pada bersekolah.⁶⁶

Adapun dampak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁶⁷ Selanjutnya dampak

⁶⁶ Dikutip dalam Munawwarah Sahib, *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa*, hlm.99

⁶⁷ Suharno, Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:Widya karya), hlm.243



dari Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kehidupan keluarga miskin dapat dilihat sebagai berikut :

a. Dampak Positif

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Pemenuhan kebutuhan pokok meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Keluarga Sangat Miskin (KSM) masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, meskipun mereka masih dalam status memiliki pekerjaan karena pendapatan yang mereka peroleh tidak mencukupi untuk memenuhi semuanya. Namun bantuan PKH dapat meringankan beban hidup mereka meskipun tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh PKH. Sesuai dengan hasil wawancara saya dengan ibu Rahma salah satu peserta penerima manfaat.

“Ibu Rahma mengatakan sebelum adanya Program Keluarga Harapan (PKH) saya dan keluarga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar namun setelah adanya Program Keluarga Harapan (PKH) saya merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar”.⁶⁸

Bantuan PKH hanya diberikan kepada orang yang hamil dan balita untuk membantu memenuhi kebutuhan gizinya, dan siswa sekolah dapat memenuhi kebutuhan sekolahnya. Bantuan tersebut dapat mengurangi beban masyarakat miskin karena tidak perlu lagi menyisihkan penghasilan tambahan untuk anak sekolah agar penghasilannya dapat lebih memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, pakaian dan bahkan untuk keperluan tempat tinggal.

⁶⁸ Wawancara Dengan Ibu Rahma, Ketua Peserta PKH Desa Teluk, tanggal 18 Maret 2021



2. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Program Keluarga Harapan (PKH) dikatakan berdampak pada peningkatan kesehatan keluarga miskin karena PKH memberikan bantuan gizi kepada ibu hamil dan balita. Sesuai dengan hasil wawancara saya dengan Ibu Salma salah satu peserta penerima manfaat.

“Beliau mengatakan setelah adanya bantuan PKH saya tidak khawatir lagi melakukan pemeriksaan fisik ke poskesmas untuk memeriksa kesehatan karena PKH memberi fasilitas BPJS kepada peserta penerima untuk memeriksakan kesehatan, sedangkan sebelumnya saya tidak pernah memeriksakan kesehatan karena keterbatasan biaya jadi jika sakit saya hanya membeli obat di warung.”⁶⁹.

Setelah adanya Program Keluarga Harapan (PKH) mewajibkan peserta untuk melakukan pemeriksaan rutin maka kesehatan mereka dapat lebih terpantau karena mereka juga semakin rajin memeriksakan kandungan dan juga balita mereka ketempat pemeriksaan yang telah disediakan. Oleh sebab itu semuanya tidak terlepas dari peran dan pemantauan pendamping yang mengecek langsung kepuskesmas data peserta PKH yang rutin atau tidaknya memeriksakan kesehatan di pelayanan kesehatan yang di sediakan.

Jika di temukan KPM yang bolos dalam pemeriksaan kesehatan maka KPM tersebut akan di tegur oleh pendamping secara langsung dan jika tidak ada perubahan ketika kembali melakukan pengecekan data KPM di pelayanan kesehatan maka peserta PKH tersebut akan diberikan sanksi dikeluarkan secara langsung oleh pendamping PKH.

⁶⁹ Wawancara Dengan Ibu Salma, Ketua Peserta PKH Desa Teluk, tanggal 18 Maret 2021



Hal tersebut agar semua peserta PKH terus rutin memeriksakan kesehatan. Selain itu mereka juga memperoleh kemudahan untuk memeriksakan diri dan keluarga mereka jika ada yang sakit tanpa khawatir dengan biaya pengobatan yang tinggi karena dengan adanya bantuan BPJS dari PKH memudahkan keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan dan kualitas kesehatan keluarga miskin tiap bulannya juga semakin meningkat.

3. Pemenuhan Pendidikan bagi Anak

Program Keluarga Harapan (PKH) juga berdampak pada terpenuhinya pendidikan dasar bagi anak-anak RTSM peserta PKH. Setelah adanya program ini, anak-anak dari keluarga miskin dapat terus bersekolah tanpa terkendala biaya sekolah dan perlengkapan sekolah. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara saya dengan Ibu Asmalina salah seorang peserta yang memiliki anak yang dahulunya menganggur akhirnya memutuskan kembali menyekolahkan anaknya tersebut, dia mengatakan bahwa

“Dulunya anak saya putus sekolah karena saya tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sekolah, dan anak saya membantu saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya bantuan PKH anak saya dapat melanjutkan sekolah dan sekarang duduk di bangku SMA”.⁷⁰

Bahkan anak-anak dari keluarga sangat miskinpun semakin rajin bersekolah, hal ini menunjukkan bahwa PKH secara bertahap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dengan pendidikan yang cukup diharapkan mereka dapat menjadi anak-anak yang cerdas dan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, dan tidak hanya sekedar bekerja

⁷⁰ Wawancara Dengan Ibu Asmalina, Peserta PKH Desa Teluk Kabupaten Batang Hari, tanggal 18 Maret 2021



diladang. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan pendamping kecamatan Bapak Hakimin.

“Banyak diantara RTSM/KSM peserta PKH yang dulunya menyuruh anak mereka bekerja disawah dan dengan adanya bantuan PKH akhirnya menyekolahkan kembali anak-anak mereka dan banyak diantara anak-anak mereka yang biasanya malas kesekolah dan akhirnya mereka bisa rajin kesekolah dan belajar dengan baik karena kebutuhan sekolah mereka sudah dapat terpenuhi”.⁷¹

Semuanya itu tidak terlepas dari kerja keras pendamping yang selalu mengecek data anak-anak dari peserta PKH di setiap sekolahan dan arahan dari pendamping ke keluarga miskin agar anak-anaknya terus rajin untuk masuk sekolah agar kedepannya anak tersebut memiliki masa depan yang baik dari kedua orang tuanya.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif dari adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah menimbulkan ketergantungan yaitu orang tua penerima hanya bergantung dengan bantuan yang ada. Seperti yang disampaikan informan dari penerima bantuan mengatakan.

“Ibuk Sodah mengatakan pemerintah terkadang tidak tepat waktu memberikan bantuan tersebut, kadang kala bantuan tersebut bisa terlambat satu minggu bahkan pernah sampai dua minggu”.⁷²

Jadi selain menimbulkan efek ketergantungan bagi peserta penerima manfaat juga menimbulkan kecemburuan sosial antara peserta penerima bantuan dengan orang yang tidak mendapatkan bantuan.

C. Faktor Penghambat dan upaya yang Mempengaruhi PKH terhadap Kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari

⁷¹ Wawancara Dengan Bapak Hakimin, Pendamping PKH Kecamatan Pelayung, tanggal 21 Januari 2021

⁷² Wawancara dengan Ibuk Sodah, Peserta Penerima PKH Desa Teluk Kabupaten Batang Hari 19 Maret 2021



Berikut uraian faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan terhadap kemiskinan di Desa Teluk yang ditemukan oleh peneliti seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, yaitu :

“Hal yang menjadi penghambat adalah masih adanya penerima PKH yang belum mencapai tujuan, hal ini menandakan masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan karena data tersebut turun langsung dari pusat bersipat *top down* bukan *button up* sehingga data tersebut berbeda dengan keadaan dilapangan, sedangkan di Desa Teluk masih banyak orang tua dan keluarga belum mendapatkan bantuan”.⁷³

Untuk mendapatkan informasi yang jelas yang disampaikan oleh pemerintah desa maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Teluk Ibuk Asna sebagai Peserta PKH :

“Beliau pernah menyanyakan perihal bantuan PKH kepada pemerintah desa, karena saya sebelumnya sudah didata oleh pemerintah desa dan pendamping PKH kecamatan tetapi setelah data tersebut dikeluarkan dari Kementrian Sosial namun nama saya tidak termasuk dalam penerima bantuan tersebut, akan tetapi pertanyaan yang saya tanyakan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pemerintahan desa”.

Pernyataan tersebutpun sejalan dengan pernyataan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Teluk yang mengatakan bahwa :

“Kami sebagai pendamping program keluarga harapan hanya menjalankan tugas memvalidasi dan mendampingi peserta penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang nama-namanya telah kami terima dari Kementrian Sosial dan kami mencari peserta tersebut diwilayah kami ditugaskan. Penerima manfaat PKH tersebut dapat diberhentikan jika kedepannya tidak memenuhi kewajiban sebagai peserta penerima PKH, namun nama peserta yang tidak berhak menerima bantuan tersebut tidak bisa ditukar dan ditambahkan”.⁷⁴

Setelah mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari selanjutnya peneliti ingin mengetahui apasaja upaya yang dilakukan aparat desa dan pendamping dalam

⁷³ Wawancara dengan Bapak Somad Kepala Desa di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari, tanggal 6 April 2021

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Hakimin selaku Pendamping PKH Kecamatan Pelayung, tanggal 6 April 2021

pelaksanaan program keluarga harapan. Oleh karena itu saya melakukan wawancara dengan aparat desa yang mengatakan :

“Pemerintah desa berharap untuk calon penerima kebijakan program keluarga harapan tersebut kedepannya kementerian sosial dapat bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menentukan siapa yang berhak menerima program keluarga harapan tersebut, karena yang mengetahui situasi dan kondisi masyarakat desa itu adalah pemerintah desa”.⁷⁵

Agar mendapatkan informasi yang lebih jelas maka peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hakimin selaku pendamping program keluarga harapan dari kabupaten batang hari

“Beliau mengatakan yang harus dilakukan adalah merubah sistem dalam penetapan peserta penerima manfaat program keluarga harapan, karena kalau masih seperti sekarang program keluarga harapan tersebut tidak akan efektif dan tidak tepat sasaran”.⁷⁶

Selanjutnya saya melakukan wawancara dengan Bapak Somad selaku datuk kepala desa di desa teluk mengenai upaya yang ingin dilakukan.

“Beliau mengatakan upaya yang ingin saya lakukan yaitu ingin bekerja sama dengan pemerintahan yang terkait dalam menentukan data peserta penerima manfaat program keluarga harapan kedepannya agar lebih efisien dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, yang bertujuan agar kendala yang terjadi ini dapat terselesaikan dan kedepannya kebijakan yang sama dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan”.⁷⁷

Berdasarkan hasil observasi dan data diatas yang dilakukan penulis di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari beberapa aspek dari Program Keluarga Harapan (PKH) telah tercapai, hal ini dibuktikan dengan telah terpenuhinya jaminan pendidikan dan kesehatan di Desa Teluk dengan memberikan tunjangan dana dan sekaligus memberikan fasilitas Program Indonesia Pintar (PIP) untuk

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Suriyansah Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Teluk Kabupaten Batang Hari, 28 Januari 2021

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Hakimin Selaku Pendamping PKH Kecamatan Pelayung 21 Januari 2021

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Somad Selaku Kepala Desa di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari 28 Januari 2021



pelajar SD-SMA. Sedangkan untuk aspek kesehatan, PKH memberikan tunjangan dana dan memberikan fasilitas BPJS kepada ibu hamil, nipas, balita dan penyandang disabilitas. Hanya saja pemberian bantuan PKH di Desa Teluk dinilai masih belum efektif dan tepat sasaran.

Dikatakan belum efektif karena jumlah penduduk miskin di Desa Teluk sebanyak 147 KK sedangkan yang mendapatkan bantuan hanya 126 KK hal ini karena penetapan RTM penerima bantuan ini data yang digunakan untuk penetapan penerima bantuan ditentukan dari pusat yaitu Kementrian Sosial dengan menggunakan data pada DTKS tanpa melihat langsung kelapangan sehingga masih ada keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH. Sedangkan ketika ada peralihan status pada RTM di daerah harus melalui proses panjang agar bisa digantikan atau dihapus dari daftar penerima bantuan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pedoman PKH serta menjadikan penetapan RTM penerima bantuan kurang tepat sasaran.

Melihat dari kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan peserta PKH di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari belum tepat sasaran, selain adanya peserta yang beralih status menjadi keluarga sejahtera namun masih mendapatkan bantuan karena kurangnya kesadaran untuk mengeluarkan diri karena sudah beralih status menjadi keluarga sejahtera tetapi juga masih mengharapkan terus mendapatkan bantuan selain itu ditemukan pula peserta yang berasal dari pejabat aparat desa yang mendapatkan bantuan PKH. Hal ini jelas membuktikan masih dijunjungnya budaya nepotisme sehingga membuat bantuan tidak tepat sasaran.

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Peran Pemerintah Desa yaitu melakukan pendataan keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan dan memvalidasi data penerima PKH yaitu pemerintah desa melihat langsung kelapangan untuk memantau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apakah telah ada kemajuan sehingga beralih status menjadi keluarga sejahterah, jika ada perubahan maka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut digantikan dengan keluarga miskin lainnya.
2. Dampak PKH terhadap keluarga miskin di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari dibedakan menjadi dua yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif PKH bagi keluarga miskin yakni membantu biaya sekolah dan pemenuhan gizi anak-anak dalam keluarga miskin, membantu keluarga miskin untuk bangkit mendirikan usaha secara mandiri agar keluarga miskin terlepas dari kemiskinan. Sementara itu, dampak negatifnya yakni terjadi konflik sosial yang di karenakan tidak semua keluarga miskin memperoleh bantuan PKH, masih ada masyarakat yang menilai bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran.
3. Faktor penghambat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan pertama data turun langsung dari pusat *top down* bukan *bottom up* sehingga data tersebut berbeda dengan keadaan dilapangan sedangkan upaya yang ingin dilakukan kepala desa yaitu ingin melakukan kerja sama dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

Kementrian Sosial, Dinas Sosial dan Pemerintah Desa dalam penetapan calon penerima bantuan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut :

1. Kepala pemerintahan tingkat desa, harus lebih selektif ketika validasi data calon KPM dengan pendamping PKH. Artinya tidak ada unsur kekeluargaan tapi lebih bersifat netral. Selain itu, ketika keluarga miskin yang telah mampu enggan dikeluarkan, maka pemerintah desa harus ikut aktif memberikan pengarahan kepada keluarga tersebut yang statusnya sebagai warga di desa itu.
2. Diharapkan kepada masyarakat penerima agar meningkatkan kesadaran diri karena yang mendapatkan bantuan ini diharapkan benar-benar keluarga miski.
3. Kepada Kementrian Sosial diharapkan dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Pemerintah Desa dalam menentukan data peserta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan melihat langsung kondisi dilapangan agar data yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang diajukan pemerintah desa sehingga kedepannya Program Keluarga Harapan (PKH) bisa terealisasikan dengan baik dan tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011

Ardito Binadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta Deepublish, 2017

Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012

Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009

Johannes, De Britto Priyono, *Analisis Kriteria dan Indikator Kemiskinan Multidimensi*, Yogyakarta, 2017

Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: YKPN, 2002

Marzuki, *Metodologi Riset* Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983

Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999

Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pembedayaan Sebagai Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Elex Media Komoutindo, 2007

Sugiyono, *metode penelitian pendekatan kuanlitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* Bandung, Alfabeta, 2017

B. Peraturan Perundang-undang

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan



Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan

C. Lain-lain

BPS Kabupaten Batang Hari, Kemiskinan, www.bps.go.id diakses pada tanggal 6 Desember 2020

Elvira Handayani Jacobus, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 19, No. 7, 2018

<https://m.cnindonesia.com/ekonomi/program> keluarga harapan di klaim efektif tekan kemiskinan diakses pada 22 juli 2020

Jainuddin, *Sistem Informasi, Kriteria Rakyat Miskin, Waterfall*, Jurnal Ilmia Ilmu Komputer, Vol. 13, No. 1, 2018

Kementerian Sosial RI, Program Keluarga Harapan 2016

PKH, Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, <http://pkh-dasar-hukum> /diakses pada 6 Desember 2020

Reza Attaburrobbi Annur, Analisis Pembangunan Ekonomi Jurnal Vol. 2 No. 4, 2013

Munawwarah Sahib, “Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa”, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.



LAMPIRAN

A. Dokumentasi di Lapangan

Gambar 1

Foto bersama Kepala Desa Teluk Kabupaten Batang Hari



Gambar 2

Foto bersama pendamping PKH Desa Teluk Kabupaten Batang Hari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

Gambar 3

Foto bersama pendamping PKH Kabupaten Batang Hari



Gambar 4

Foto bersama peserta PKH



State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Informasi Diri

Nama : Jauna

Nim : 105170481

TTL : Teluk, 05-10-1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Teluk RT 01 Kecamatan Pemayang

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

No Hp : 0813-7097-3300



B. Riwayat Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TEMPAT	TAHUN
1.	SD NEGERI 18/1 DESA TELUK	DESA TELUK	2005-2010
2.	MADRASAH TSANAWIYAH	DESA TELUK	2010-2013
3.	MADRASAH ALIYAH	DESA SELAT	2013-2016
4.	S1 UIN STS JAMBI	MUARU JAMBI	

C. Pengalaman Organisasi

NO	JENJANG PENGALAMAN	JABATAN	TAHUN
1.	gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	Anggota	17 S/D sekarang